

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator penting dalam kajian ekonomi makro, khususnya dalam menganalisis perilaku konsumsi masyarakat. Dalam perspektif makroekonomi, pengeluaran rumah tangga menjadi komponen utama dalam pembentukan permintaan agregat (*aggregate demand*), yang berperan sebagai penggerak utama aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengeluaran yang tinggi mencerminkan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan output dan investasi dalam perekonomian.

Secara konseptual, pengeluaran rumah tangga berkaitan erat dengan teori konsumsi dalam ekonomi. Salah satu teori yang relevan adalah *Absolute Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh (Keynes, 1936), yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima. Semakin tinggi pendapatan, maka kecenderungan untuk melakukan pengeluaran juga akan meningkat. Selain itu, dalam *Permanent Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh (Milton, 1957), dijelaskan bahwa keputusan konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi juga oleh ekspektasi pendapatan jangka panjang, sehingga pengeluaran cenderung lebih stabil dibandingkan pendapatan.

Dalam praktiknya, pengeluaran per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Sukirno, 2014), pengeluaran per kapita mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas konsumsi. Semakin tinggi pengeluaran per kapita, maka menunjukkan semakin besar pula tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, pengeluaran per kapita dinilai lebih representatif dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat dibandingkan hanya melihat pendapatan nominal yang cenderung berfluktuasi.

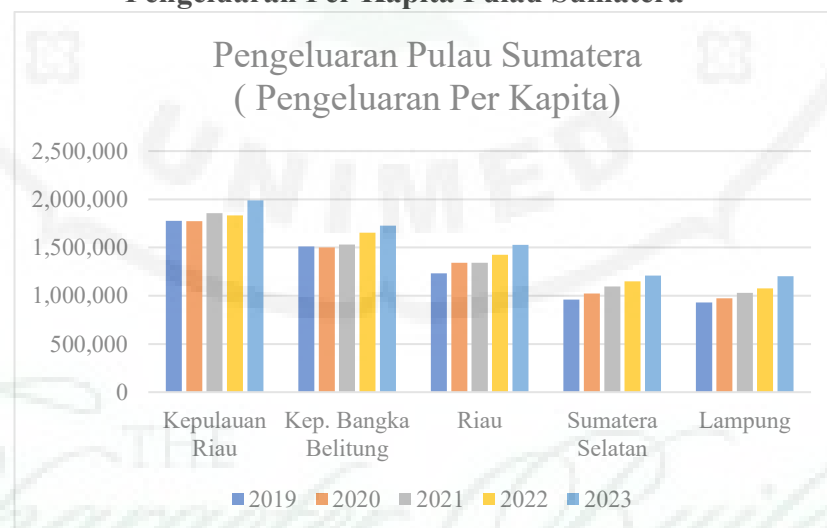
Secara nasional, pengeluaran rumah tangga di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta perkembangan teknologi digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 4,5–5 persen per tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan pendapatan antarwilayah serta disparitas pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi distribusi pengeluaran masyarakat. Di sisi lain, kenaikan inflasi pada periode pascapandemi turut memberikan tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Selain faktor ekonomi makro, pengeluaran rumah tangga Indonesia juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumsi yang semakin terintegrasi dengan perkembangan teknologi digital. Fenomena digitalisasi dan meningkatnya penetrasi internet telah mendorong pergeseran pola konsumsi dari konvensional menuju digital. Laporan (Bank Indonesia, 2024) mencatat bahwa transaksi digital mengalami peningkatan signifikan seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, sistem pembayaran elektronik, dan layanan keuangan digital lainnya. Kondisi ini di satu sisi memperluas akses masyarakat terhadap berbagai barang dan jasa, namun di sisi lain juga berpotensi mengubah pola pengeluaran rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli secara keseluruhan. Meskipun secara agregat pengeluaran per kapita nasional meningkat, data menunjukkan bahwa kontribusi peningkatan tersebut masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah nonmetropolitan relatif tertinggal dalam hal pertumbuhan daya beli. Faktor akses terhadap infrastruktur ekonomi, layanan digital, serta distribusi pendapatan yang belum merata menjadi penyebab utama kesenjangan tersebut.

Jika ditinjau secara regional, Pulau Sumatera memiliki karakteristik ekonomi yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar serta basis industri dan perdagangan yang kuat, Sumatera memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun BPS (2023) mencatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita di Pulau Sumatera masih berada di bawah Pulau Jawa,

terutama di daerah-daerah dengan tingkat urbanisasi rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumatera, khususnya peningkatan pengeluaran rumah tangga. Secara umum, seluruh provinsi di Pulau Sumatera ini memperlihatkan tren peningkatan, meskipun dengan kecepatan pertumbuhan yang bervariasi. Kenaikan pengeluaran per kapita ini mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan dan kemampuan konsumsi masyarakat, yang menjadi cerminan peningkatan aktivitas ekonomi, digitalisasi transaksi, serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun, di balik tren kenaikan tersebut, masih tampak kesenjangan daya beli antarprovinsi yang cukup jelas di Pulau Sumatera.

Gambar 1.1
Pengeluaran Per Kapita Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Beberapa provinsi yang menonjol dengan tingkat pengeluaran per kapita yang tinggi dan stabil, seperti Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi tertinggi dalam hal pengeluaran per kapita, dari Rp 1,778 juta

pada tahun 2019 menjadi Rp 1,989 juta pada tahun 2023. Tingginya daya beli di Kepulauan Riau tidak hanya mencerminkan besarnya nilai pengeluaran, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik struktural perekonomian daerah tersebut. Struktur ekonomi Kepulauan Riau didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang cenderung menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan stabil dibandingkan sektor primer. Dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi ini menciptakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang relatif lebih baik, sehingga mendorong peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat. Selain itu, posisi geografis Kepulauan Riau yang strategis sebagai wilayah perbatasan dan dekat dengan pusat ekonomi internasional turut memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Tingginya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja menciptakan arus pendapatan yang lebih dinamis, yang pada akhirnya tercermin dalam pengeluaran per kapita yang tinggi.

Sebaliknya, Provinsi Lampung menunjukkan tingkat daya beli yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Meskipun pengeluaran per kapita Lampung meningkat dari sekitar Rp929 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp1,20 juta pada tahun 2023, nilainya masih berada di bawah rata-rata provinsi lain. Rendahnya daya beli ini terutama disebabkan oleh struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas dan nilai tambah yang relatif rendah. Sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, namun pendapatan yang dihasilkan cenderung terbatas, tidak stabil, dan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman serta fluktuasi harga komoditas. Di sisi lain, keberadaan sektor pertambangan di Lampung belum

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara luas. Aktivitas pertambangan didominasi oleh komoditas non-logam dengan nilai tambah rendah dan minim hilirisasi, serta bersifat padat modal sehingga menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas. Akibatnya, manfaat ekonomi sektor ini tidak terdistribusi secara merata ke rumah tangga masyarakat. Struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor primer dan industri pengolahan skala terbatas menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pengeluaran per kapita, khususnya pada komponen non-makanan, menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur konsumsi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan pokok, sehingga alokasi untuk kebutuhan non-primer relatif terbatas, meskipun biaya hidup di wilayah tersebut cenderung lebih rendah.

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah memperluas perspektif dalam analisis pengeluaran rumah tangga. Digitalisasi tidak hanya mengubah pola interaksi dan transaksi masyarakat, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi baru yang berbasis teknologi. Perkembangan e-commerce memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai barang dan jasa secara lebih mudah tanpa terbatas oleh wilayah geografis, sehingga berpotensi meningkatkan aktivitas konsumsi. Di sisi lain, meningkatnya konsumsi telekomunikasi mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu,

transaksi digital turut mempercepat proses pembayaran dan mendorong efisiensi dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga serta memperkuat inklusi keuangan. Ketiga aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan daya beli melalui kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta penghematan waktu dan biaya.

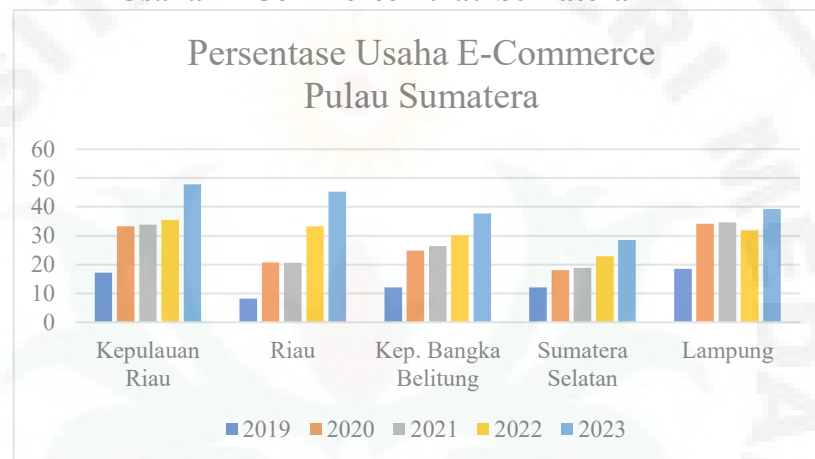
E-commerce memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dengan harga yang lebih kompetitif tanpa batasan geografis, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi melalui kemudahan akses dan variasi pilihan barang, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga. Perkembangan e-commerce telah menggeser pola belanja masyarakat dari sistem konvensional menuju transaksi digital berbasis internet. Melalui platform e-commerce, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa secara lebih efisien dan fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Sasi, 2024) menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi, keberagaman produk, dan fleksibilitas transaksi mendorong meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk berbelanja secara daring.

Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku konsumsi yang tidak hanya didorong oleh kebutuhan, tetapi juga oleh efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan teknologi digital.

Dengan demikian, pengeluaran rumah tangga tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pola konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa penetrasi *e-commerce* menjadi salah satu faktor

penting yang memengaruhi dinamika pengeluaran rumah tangga dalam ekonomi modern.

Gambar 1.2
Usaha E- Commerce Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pertumbuhan e-commerce di Sumatera belum berlangsung secara merata antarprovinsi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam proses transformasi digital. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah dengan perkembangan e-commerce paling menonjol, ditandai oleh peningkatan persentase usaha yang memanfaatkan e-commerce dari 17,23% pada tahun 2019 menjadi 47,82% pada tahun 2023. Tingginya adopsi e-commerce di Kepulauan Riau tidak terlepas dari karakter wilayah yang sejak awal berkembang sebagai kawasan industri dan perdagangan yang terintegrasi dengan pasar nasional dan internasional. Struktur kegiatan ekonomi yang didominasi oleh perdagangan, industri pengolahan, jasa logistik, dan usaha penunjang industri mendorong pelaku usaha untuk mengandalkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Faktor geografis Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan juga menjadikan

e-commerce sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan jarak dan biaya distribusi. Penjualan daring memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen lintas wilayah tanpa harus bergantung pada toko fisik yang mahal dan terbatas secara geografis. Kondisi ini diperkuat oleh kesiapan infrastruktur digital dan logistik, termasuk jaringan internet, sistem pembayaran digital, dan layanan pengiriman yang relatif lebih baik. Dari sisi permintaan, masyarakat Kepulauan Riau telah terbiasa menggunakan layanan digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, sehingga menciptakan pasar yang responsif terhadap transaksi e-commerce.

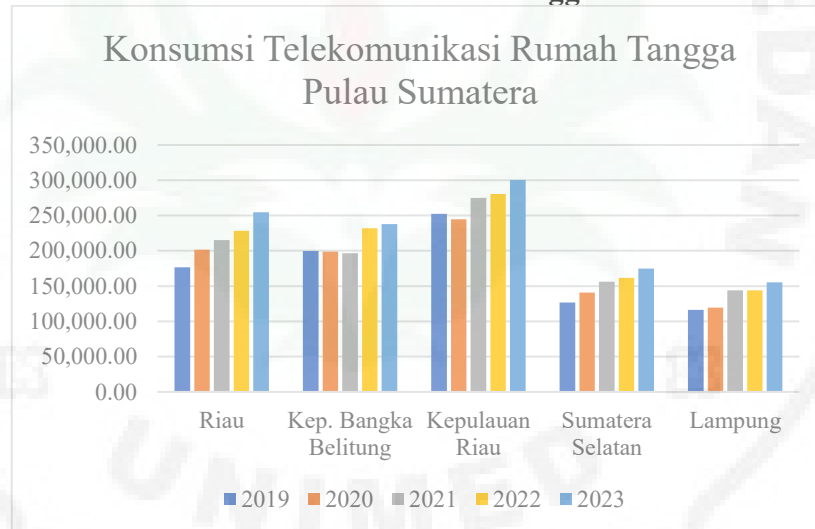
Sebaliknya, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan e-commerce yang relatif lebih lambat, dengan peningkatan dari 12,14% pada tahun 2019 menjadi 28,46% pada tahun 2023. Lambatnya adopsi ini mencerminkan adanya kendala struktural, terutama keterbatasan infrastruktur digital di wilayah perdesaan. Jaringan internet yang belum merata, keberadaan wilayah *blank spot*, serta keterbatasan infrastruktur pendukung menyebabkan aktivitas e-commerce sulit dilakukan secara konsisten. Selain itu, infrastruktur logistik dan transportasi yang kurang efisien meningkatkan biaya dan waktu distribusi, sehingga mengurangi daya saing penjualan daring dibandingkan pemasaran konvensional. Dari sisi sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah agraris, turut menghambat pemanfaatan e-commerce. Keterbatasan pemahaman terkait pemasaran digital, sistem pembayaran non-tunai, dan pengelolaan pengiriman membuat e-commerce belum sepenuhnya dipandang sebagai peluang strategis untuk

memperluas pasar. Faktor sosial dan pola konsumsi masyarakat yang masih berorientasi pada transaksi tatap muka juga mengurangi dorongan bagi pelaku usaha untuk beralih ke penjualan daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun e-commerce memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya beli, manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Pulau Sumatera.

Tren kenaikan persentase usaha e-commerce di lima provinsi Pulau Sumatera menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat semakin bergeser ke arah digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suwanan & Allya, 2023) yang menunjukkan hubungan signifikan antara kemudahan dan manfaat e-commerce dengan intensitas pembelian konsumen. Namun, perbedaan tingkat pertumbuhan antarprovinsi juga menegaskan adanya ketimpangan dalam akses, kemampuan, dan adaptasi terhadap ekonomi digital. Dalam daerah dengan kesenjangan digital dan ekonomi yang masih tinggi, seperti di sebagian wilayah Indonesia, kemajuan e-commerce dapat memperlebar ketimpangan konsumsi antar kelompok pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Abass, 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum merata cenderung meningkatkan kesenjangan konsumsi antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Hal ini menandakan bahwa bagi sebagian masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, e-commerce belum tentu memperkuat daya beli, bahkan dapat menimbulkan tekanan konsumsi akibat dorongan perilaku belanja impulsif dan akses terhadap produk konsumtif yang semakin luas.

Faktor lain yang mempengaruhi Konsumsi telekomunikasi rumah tangga, khususnya dalam bentuk penggunaan layanan data dan internet, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengeluaran rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dalam berbagai aktivitas, sehingga mendorong perubahan pola konsumsi serta alokasi pengeluaran ke arah kebutuhan digital.

Gambar 1.3
Konsumsi Telekomunikasi Rumah Tangga Pulau Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Secara umum, konsumsi telekomunikasi rumah tangga di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan tren meningkat selama periode 2019–2023. Provinsi Kepulauan Riau mencatat tingkat konsumsi telekomunikasi tertinggi, meningkat dari sekitar Rp252 ribu pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp300 ribu pada tahun 2023. Tingginya konsumsi ini berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif lebih baik, tercermin dari PDRB per kapita yang tinggi. Dalam kondisi pendapatan yang lebih besar, layanan telekomunikasi tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan

menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Struktur ekonomi Kepulauan Riau yang didominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peran Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pusat bisnis internasional, menjadikan konektivitas digital sebagai faktor penting dalam aktivitas kerja, usaha, dan transaksi ekonomi. Karakter wilayah yang dominan perkotaan dan dukungan infrastruktur digital yang relatif maju semakin mendorong tingginya konsumsi layanan telekomunikasi rumah tangga.

Sebaliknya, Provinsi Lampung menunjukkan tingkat konsumsi telekomunikasi yang relatif lebih rendah, meskipun mengalami peningkatan dari sekitar Rp116 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp155 ribu pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat, namun belum berkembang sepesat provinsi dengan struktur ekonomi yang lebih modern. Rendahnya konsumsi telekomunikasi di Lampung terutama dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang tidak menuntut penggunaan internet secara intensif. Selain itu, tingkat PDRB per kapita yang relatif lebih rendah menyebabkan rumah tangga memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar, sehingga alokasi belanja untuk layanan telekomunikasi masih terbatas. Dominasi wilayah perdesaan juga membuat adopsi gaya hidup digital berjalan lebih lambat, yang pada akhirnya menjelaskan rendahnya konsumsi telekomunikasi rumah tangga dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

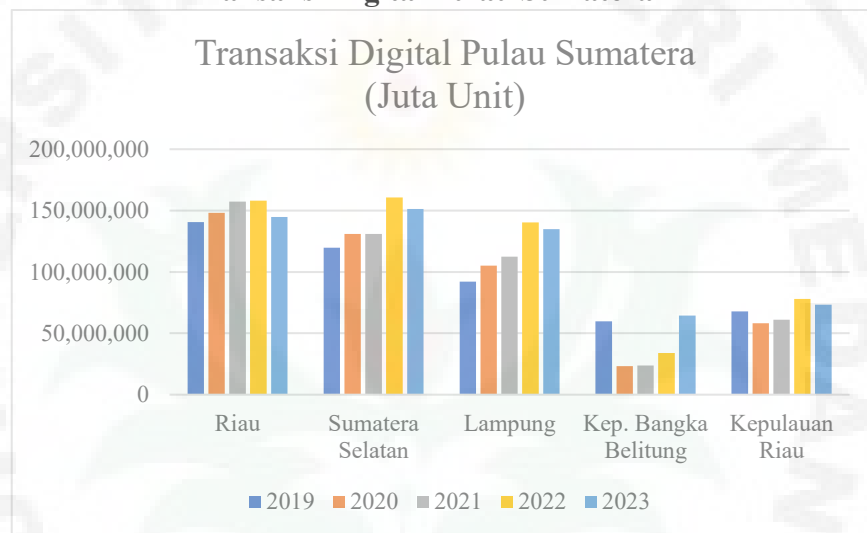
Perbedaan tingkat konsumsi telekomunikasi antarprovinsi mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses dan kapasitas digital masyarakat. Provinsi

dengan konsumsi telekomunikasi yang lebih tinggi, seperti Kepulauan Riau, umumnya menunjukkan daya beli yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah. Infrastruktur digital yang tercermin dari pengeluaran telekomunikasi berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan posisi tawar dan mengurangi asimetri informasi (Nayyar et al., 2024). Pengurangan asimetri informasi memungkinkan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang lebih rasional, sehingga meningkatkan nilai riil dari pengeluaran yang dilakukan. Namun, peningkatan konsumsi telekomunikasi rumah tangga tidak selalu mencerminkan penguatan daya beli. Meskipun pengeluaran untuk layanan komunikasi dan internet menunjukkan kemampuan akses terhadap teknologi, pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah pengeluaran tersebut berpotensi menjadi beban finansial. Penelitian yang diterbitkan oleh (Seldal & Nyhus, 2022) menunjukkan bahwa peningkatan belanja pada layanan digital dapat memperbesar kerentanan keuangan masyarakat dengan literasi finansial rendah, karena pengeluaran tersebut cenderung bersifat konsumtif dan tidak produktif.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera adalah transaksi digital. Perkembangan transaksi digital tidak hanya mencerminkan perubahan perilaku konsumen, tetapi juga menunjukkan pergeseran struktur ekonomi daerah yang semakin dipengaruhi oleh inovasi teknologi finansial. Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), kemudahan penggunaan dan kegunaan pembayaran digital menurunkan

hambatan dalam bertransaksi, sehingga mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan aktivitas ekonomi.

Gambar 1.4
Transaksi Digital Pulau Sumatera



Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data transaksi digital periode 2019–2023, perkembangan transaksi digital antarprovinsi di Pulau Sumatera menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Provinsi Riau tercatat memiliki nilai transaksi digital yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain, meningkat dari Rp140,66 juta pada tahun 2019 menjadi Rp158,17 juta pada tahun 2022, meskipun mengalami penurunan menjadi Rp144,79 juta pada tahun 2023. Tingginya nilai transaksi digital di Riau terutama dipengaruhi oleh besarnya skala perekonomian daerah dan tingginya intensitas aktivitas ekonomi. Riau merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Sumatera dengan basis ekonomi yang kuat pada sektor sumber daya alam, perdagangan, serta aktivitas ekspor dan impor. Keberadaan sektor minyak bumi, kelapa sawit, serta pelabuhan ekspor seperti Dumai dan Pekanbaru menciptakan arus transaksi bernilai besar dan berulang,

sehingga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Selain faktor ekonomi, karakteristik demografis turut memperkuat tingginya transaksi digital di Riau. Jumlah penduduk yang relatif besar dan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, terutama di Kota Pekanbaru, meningkatkan permintaan terhadap transaksi non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, seperti perdagangan ritel, transportasi, dan jasa. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone mempercepat adopsi pembayaran digital, khususnya melalui layanan e-wallet dan perbankan digital. Orientasi ekonomi Riau yang terhubung dengan pasar regional dan internasional, termasuk kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia, juga mendorong intensitas transaksi lintas wilayah dan penggunaan layanan keuangan digital. Dukungan regulasi serta perluasan ekosistem pembayaran digital semakin memperkuat posisi Riau sebagai provinsi dengan volume transaksi digital tertinggi di Pulau Sumatera.

Sebaliknya, Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan volume transaksi digital yang relatif lebih rendah dan fluktuatif. Nilai transaksi digital di provinsi ini menurun tajam dari Rp59,78 juta pada tahun 2019 menjadi Rp23,17 juta pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat menjadi Rp64,36 juta pada tahun 2023. Rendahnya transaksi digital di Bangka Belitung terutama disebabkan oleh keterbatasan skala ekonomi dan struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi. Aktivitas ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan timah, yang secara operasional cenderung menggunakan sistem pembayaran konvensional dan tidak membutuhkan transaksi digital dalam jumlah besar.

Jumlah penduduk yang relatif kecil serta dominasi wilayah perdesaan turut membatasi volume transaksi ekonomi, sehingga intensitas penggunaan pembayaran digital menjadi rendah. Keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi faktor penghambat utama di Kepulauan Bangka Belitung. Penetrasi internet yang belum merata, ditambah dengan kondisi geografis kepulauan, menyebabkan distribusi jaringan dan layanan keuangan digital berjalan lambat. Struktur wilayah yang tersebar meningkatkan biaya pengembangan infrastruktur, sehingga adopsi e-wallet dan sistem pembayaran digital oleh rumah tangga maupun pelaku usaha kecil belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan transaksi digital pascapandemi, kondisi struktural tersebut menyebabkan volume transaksi digital di Kepulauan Bangka Belitung tetap tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera.

Secara keseluruhan, peningkatan transaksi digital di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023 menunjukkan semakin tingginya adaptasi masyarakat terhadap sistem ekonomi digital. Meskipun tingkat pertumbuhan antarprovinsi menunjukkan perbedaan, tren tersebut mencerminkan semakin luasnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi yang berpotensi mendorong perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Hal ini terjadi melalui percepatan perputaran uang, efisiensi biaya transaksi, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pasar melalui *e-commerce* dan layanan keuangan digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Bank Indonesia (2024) yang menekankan peran digitalisasi sistem pembayaran dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan inklusi ekonomi. Namun demikian, transaksi digital tidak selalu memberikan dampak positif

terhadap pengeluaran rumah tangga. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi dapat mendorong perilaku konsumtif dan pembelian impulsif apabila tidak disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga berpotensi meningkatkan pengeluaran secara berlebihan dan mengurangi efisiensi dalam alokasi konsumsi rumah tangga. Penelitian oleh (Faraz & Anjum, 2025) menemukan bahwa penggunaan metode pembayaran digital secara berlebihan meningkatkan kecenderungan individu untuk melakukan pengeluaran yang tidak direncanakan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kemampuan finansial jangka panjang. Namun demikian, transaksi digital tidak selalu berdampak positif terhadap pengeluaran rumah tangga. Kemudahan akses dan kecepatan transaksi berpotensi mendorong perilaku konsumtif serta pembelian impulsif apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak terkontrol dan menurunkan efisiensi dalam alokasi konsumsi.

Dari ketiga aspek digitalisasi yang mempengaruhi daya beli adalah hal yang menarik untuk diperhatikan adalah hubungan antara naiknya pengeluaran rumah tangga yang terlihat dari peningkatan pengeluaran per kapita dengan pesatnya perkembangan digitalisasi di Pulau Sumatera. Penggunaan e-commerce, layanan telekomunikasi, dan transaksi digital kini tidak hanya memudahkan masyarakat berbelanja, tetapi juga mengubah cara mereka mengambil keputusan, menghemat waktu dan biaya, serta memberi posisi tawar yang lebih kuat karena informasi lebih terbuka. Dengan kata lain, digitalisasi

membuat setiap Rupiah yang dibelanjakan bisa memberikan manfaat lebih besar, sehingga pengeluaran rumah tangga ikut meningkat.

Meskipun secara teoretis dan empiris digitalisasi sering dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam literatur yang melandasi pentingnya penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis pengaruh e-commerce, konsumsi telekomunikasi, atau transaksi digital secara terpisah, sehingga belum mampu menggambarkan dampak sinergis dari ketiga dimensi digitalisasi tersebut ketika diuji secara simultan. Kedua, kajian empiris di Indonesia umumnya berfokus pada tingkat nasional atau wilayah Pulau Jawa, sehingga bukti yang secara spesifik merepresentasikan karakteristik dan keragaman ekonomi Pulau Sumatera masih terbatas. Ketiga, banyak studi menggunakan data *cross-section* yang kurang mampu menangkap dinamika perubahan antarwaktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis empiris yang terintegrasi dan kontekstual melalui pendekatan regresi data panel pada 10 provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2024.

Atas dasar fenomena ketiga variabel yaitu e-commerce, konsumsi telekomunikasi rumah tangga, dan transaksi digital, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh E-Commerce, Konsumsi Telekomunikasi Rumah Tangga, dan Transaksi Digital terhadap Pengeluaran Rumah Tangga di Pulau Sumatera.” Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam memperkaya

literatur mengenai ekonomi digital di tingkat regional sekaligus menjadi dasar pertimbangan kebijakan pembangunan berbasis digital di wilayah Sumatera.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai dampak digitalisasi terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera, sehingga yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah meliputi :

1. Meningkatnya aktivitas e-commerce di berbagai provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2019–2023 belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pengeluaran rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi digital dengan kemampuan konsumsi masyarakat, yang mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas e-commerce belum secara langsung mendorong peningkatan daya beli di tingkat regional.
2. Konsumsi telekomunikasi rumah tangga di Pulau Sumatera terus mengalami peningkatan signifikan selama periode 2019–2023, namun tidak sejalan dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan komunikasi dan akses digital belum memberikan efek positif yang konsisten terhadap kemampuan konsumsi riil.
3. Transaksi digital masyarakat di Pulau Sumatera menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, tetapi belum mencerminkan peningkatan pengeluaran rumah tangga yang stabil. Kondisi ini menandakan adanya potensi ketimpangan antara perkembangan sistem pembayaran digital dan

kondisi ekonomi riil masyarakat, yang dapat menjadi indikasi perlunya keseimbangan antara inovasi finansial digital dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat diselesaikan sesuai lingkup proposal, maka beberapa pembatasan masalah ditetapkan.

1. Variabel independen penelitian difokuskan pada tiga faktor utama, yaitu e-commerce, konsumsi telekomunikasi rumah tangga, dan transaksi digital. Faktor-faktor ekonomi makro lain, seperti inflasi, suku bunga, atau pendapatan riil, hanya dijadikan konteks umum dan tidak menjadi fokus utama analisis.
2. Variabel dependen yang menjadi pusat kajian adalah pengeluaran rumah tangga, yang diukur melalui indikator pengeluaran atau konsumsi rumah tangga.
3. Lingkup penelitian dibatasi pada wilayah Pulau Sumatera dengan rentang waktu yang relevan dengan percepatan digitalisasi, yakni sekitar periode 2019–2024 atau sesuai ketersediaan data terbaru.
4. Analisis difokuskan pada hubungan kausalitas empiris dan kontribusi kuantitatif, baik secara simultan maupun parsial, dari ketiga variabel independen terhadap daya beli masyarakat.

1.4 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah pada proposal penelitian ini ialah :

1. Apakah terdapat pengaruh e-commerce terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera?
2. Apakah terdapat pengaruh konsumsi telekomunikasi rumah tangga terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera?
3. Apakah terdapat pengaruh transaksi digital terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera?
4. Apakah terdapat pengaruh e-commerce, konsumsi telekomunikasi rumah tangga dan transaksi digital terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh e-commerce terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh konsumsi telekomunikasi rumah tangga terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh transaksi digital terhadap pengeluaran rumah tangga di Pulau Sumatera.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Menyediakan informasi dan analisis empiris mengenai pengaruh e-commerce, konsumsi telekomunikasi, dan transaksi digital terhadap pengeluaran rumah tangga masyarakat di Pulau Sumatera.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam penguatan pengeluaran rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
3. Menjadi referensi bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk memahami peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga.